

**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PENGUKURAN KINERJA**

(Studi Kasus pada Pemda Kota Bandar Lampung)

**Goenawan, Universitas Bandar Lampung
Bhakti S. Sastranegara, Universitas Bandar Lampung
Syamsu Rizal, Universitas Bandar Lampung**

Abstract

The purpose of the writing of this thesis is to determine whether there is influence of the quality of the financial report on local government performance measurement against the city of Bandar Lampung. The Data used in this research is the primary data, i.e. data obtained directly in the form of data documentation, that require further processing and developed with its own understanding by the authors based on existing theories. The results of this study found that the audit results of the CPC Government financial statements Of Bandar Lampung in 2009 stating an opinion with the exception of "wajar". Although the audit said was enough, but it is far from achieving the maximum results, because it is still in the reasonable with the exception. Although its financial performance to get the criteria enough, but the quality of its financial reporting has not been fullest. As for measuring the financial performance of local governments, its financial Reports shall be considered qualified in advance so that it can be maximal To analyze financial performance.

Keywords : *Financial Statements, Performance Measurement,*

1. LATAR BELAKANG

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Pengukuran kinerja memang harus dilakukan secara *ex ante* hingga *ex posto* terkait dengan indikasi/ukuran kinerjanya. Konsep sederhananya, pengukuran kinerja selalu melibatkan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis, terkait dengan besar kecil atau banyak sedikit input yang digunakan. Realisasi anggaran yang dikenal pada laporan akuntabilitas sektor pemerintah termasuk dalam pengertian ekonomis karena terkait dengan besar kecilnya anggaran yang digunakan. Besaran anggaran (pengeluaran) yang telah digunakan bukanlah produk sebuah proses meskipun biasanya dicatat sebagai output. Itu sebenarnya hanyalah input yang sesungguhnya dari proses. Semakin sedikit anggaran (pengeluaran) yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan, semakin kecil realisasi anggaran sehingga dikatakan semakin ekonomis untuk kegiatan terkait.

Semakin ekonomis berarti semakin baik. Namun kata 'baik' tersebut tidak dapat dikatakan baik untuk menilai kegiatan secara keseluruhan. Artinya, kata baik untuk ukuran ekonomis masih merupakan 'indikasi' yang baik untuk penilaian keseluruhan, karena bisa jadi tingkat ekonomis yang tinggi tersebut terjadi karena pelaku organisasi takut menggunakan anggaran akibat tuntutan transparansi yang kuat sehingga target kegiatan/output tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu agar 'indikasi' tersebut menjadi benar-benar bernilai 'baik' untuk keseluruhan program/kegiatan maka diperlukan konfirmasi input terhadap output, yang dikenal sebagai efisiensi. Di sektor pemerintah, input output yang paling dikenal dan mudah digunakan dalam melakukan pengukuran efisiensi

adalah nilai rupiah misalnya realisasi biaya untuk mencapai pendapatan sebagai input sementara sebagai output adalah realisasi pendapatan. Pengukuran kinerja sektor pemerintah yang baik/lengkap memang agak susah dilakukan dalam satu periode anggaran. Jika tingkat ekonomis dan efisiensi baik serta efektifitas juga baik maka penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dikatakan sempurna.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

2.2 Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- a) masyarakat;
- b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah.

2.3 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas:
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen:
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*):
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2.6 Identifikasi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b). cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- c). tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d). mata uang pelaporan; dan ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.7 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

Aset:

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Kewajiban:

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Ekuitas Dana:

Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a). Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b). Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c). Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Laporan Kinerja Keuangan

Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

2.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

Relevan:

Informasi yang relevan :

- a). Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*): Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b). Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*): Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c). Tepat waktu: Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d). Lengkap: Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a). Penyajian Jujur: Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b). Dapat Diverifikasi (*verifiability*): Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c). Netralitas: Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan:

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dapat Dipahami:

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.9 Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

Materialitas:

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang

material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat:

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif:

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Rumus Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

$$1 \quad \text{Rasio Cair} = \frac{\text{Aset Lancar - Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

$$2 \quad \text{Rasio Kewajiban To Total Aset} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$3 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Ekuitas Dana} \\ \text{To} \\ \text{Total Aset} \end{array} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$4 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Belanja Operasi} \\ \text{To} \\ \text{Total Belanja} \end{array} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$5 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Belanja Modal} \\ \text{To} \\ \text{Total Belanja} \end{array} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$6 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio PAD} \\ \text{Terhadap} \\ \text{Total Pendapatan} \end{array} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$7 \quad \text{DSR} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok & Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$8 \quad \text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

$$9 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Dana Perimbangan} \\ \text{To} \\ \text{Total Pendapatan} \end{array} = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Dana}} \times 100\%$$

(Sumber: BPK RI 2007)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek merupakan suatu yang dijadikan bahan untuk melakukan penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini objek yang diambil adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber dan Jenis Data

Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa data dokumentasi, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis berdasarkan teori-teori yang ada.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersangkutan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan melalui Dokumentasi, mengumpulkan data yang diperlukan berupa laporan keuangan (laporan realisasi anggaran tahun 2009) Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.3 Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan suatu analisis untuk mengolah data lebih lanjut data tersebut.

3.3.1 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan alat-alat yang bersifat kuantitatif, seperti rumus-rumus dan model-model. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan rasio keuangan Pemerintah Daerah. Ada sembilan rasio keuangan Pemerintah Daerah, yaitu

Rumus Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

$$1 \quad \text{Rasio Cair} = \frac{\text{Aset Lancar - Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

$$2 \quad \text{Rasio Kewajiban To Total Aset} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$3 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Ekuitas Dana} \\ \text{To} \\ \text{Total Aset} \end{array} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$4 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Belanja Operasi} \\ \text{To} \\ \text{Total Belanja} \end{array} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$5 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Belanja Modal} \\ \text{To} \\ \text{Total Belanja} \end{array} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$6 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio PAD} \\ \text{Terhadap} \\ \text{Total Pendapatan} \end{array} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$7 \quad \text{DSR} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok \& Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$8 \quad \text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

$$9 \quad \begin{array}{l} \text{Rasio Dana Perimbangan} \\ \text{To} \\ \text{Total Pendapatan} \end{array} = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Dana}} \times 100\%$$

3.3.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan untuk melakukan analisa data dengan pendekatan teoritis. Analisis yang dilaksanakan dengan melakukan analisis data-data rasio keuangan untuk mengetahui apakah kinerja keuangannya dapat dikatakan baik, cukup, atau tidak baik. Masing-masing rasio diberi skor 2 untuk rasio baik, skor 1 untuk rasio tidak baik. Kriteria untuk pengujian rasio keuangan secara kualitatif adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perincian Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan

No.	Rasio	Baik	Nilai	Tidak Baik	Nilai
A	Rasio Antar Pos Neraca				
1	Rasio Cair (Quick Ratio)	$\geq 100\%$	2	$< 100\%$	1
2	Rasio Kewajiban terhadap Total Aset	$\leq 100\%$	2	$> 100\%$	1
3	Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset	$\leq 100\%$	2	$> 100\%$	1
	Sub Total		6		3
B	Rasio Antar Pos Pelaporan Realisasi APBD				
1	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	$\leq 50\%$	2	$> 50\%$	1
2	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	$\geq 50\%$	2	$< 50\%$	1
3	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	$\geq 50\%$	2	$< 50\%$	1
4	DSR	$\leq 0\%$	2	$> 0\%$	1
5	DSCR	≤ 2.5 kali	2	> 2.5 kali	1
6	Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	$\leq 50\%$	2	$> 50\%$	1
	Sub Total		12		6
	Total		18		9

(Sumber: BPK RI 2007)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 provinsi Lampung merupakan keresidenan, dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983 dan tahun 1999 berubah menjadi kota Bandar Lampung. Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode deskriptif, maka diketahui bahwa kualitas laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung sudah cukup baik karena telah memenuhi beberapa kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan.

4.2.1 Laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah relevan

Laporan Keuangan Pemda Kota Bandar Lampung sudah cukup relevan karena:

1. Memiliki manfaat umpan balik karena informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif karena dari laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung kita dapat memprediksi bagaimana kondisi masa yang akan datang dengan melihat laporan keuangan pada saat ini, misalnya saja dengan melihat apakah anggaran yang dianggarkan telah tercapai atau belum. Jadi kita dapat memprediksi masa yang akan datang dari hasil yang didapat di masa lalu.
3. Walaupun dalam penyusunannya laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung belum tepat waktu, namun isi dari laporan keuangan tersebut telah cukup relevan.
4. Dalam laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung belum cukup lengkap karena hanya menyajikan laporan keuangan seperti neraca dan laporan realisasi anggaran saja, padahal seharusnya laporan keuangan yang disajikan harus lengkap mencakup neraca, realisasi anggaran, arus kas, catatan atas laporan keuangan serta perubahan ekuitas.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah cukup material, karena informasi di dalamnya sudah benar.

4.2.2 Laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung sudah cukup andal

Laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung sudah cukup andal karena:

1. Dalam penyajian Laporan Keuangannya Pemda Kota Bandar Lampung sudah menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
2. Laporan Keuangan Pemda Kota Bandar Lampung dapat diverifikasi, karena informasi yang terdapat di dalamnya dapat diuji dan apabila diuji oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak akan berbeda jauh.
3. Laporan Keuangan Pemda Kota Bandar Lampung sudah netral, karena tidak diarahkan pada kebutuhan suatu pihak tertentu.

4.2.3 Laporan Keuangan Pemda Kota Bandar Lampung dapat dibandingkan

Laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung dapat dibandingkan karena informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang ada pada periode sebelumnya.

4.2.4 Laporan Keuangan Pemda Kota Bandar Lampung dapat dipahami

Laporan keuangan Pemda Kota Bandar Lampung telah dapat dipahami karena informasi yang terdapat di dalamnya sudah dapat dipahami oleh penggunanya dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai.

4.3 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Dalam penelitian ini, Laporan Keuangan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Neraca Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009, kemudian Laporan Keuangan tersebut digunakan dalam menganalisis Rasio Antar Pos Neraca dan Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD.

Rasio Antar Pos Neraca

Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cair th 2009} &= \frac{\text{Aset Lancar - Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\% \\ &= \frac{31.873.404.451,07 - 4.841.775.457,67}{6.040.194.545,20} \times 100\% \\ &= 447,53\% \end{aligned}$$

cair (*quick ratio*) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari Kas di Kas daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lain-lain dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka diatas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka dibawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Pencapaian rasio tahun 2009 sebesar 447,53% menunjukan kinerja keuangan yang sangat baik, artinya Pemerintah

Rasio Kewajiban terhadap Total Aset

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kewajiban} &= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ \text{to Total Aset th 2009} &= \frac{6.060.723.333,20}{1.822.081.028.595,18} \times 100\% \\ &= 0,33\% \end{aligned}$$

Rasio Kewajiban terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandar Lampung. Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekuitas Dana} &= \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ \text{to Total Aset th 2009} &= \frac{1.816.020.305.261,98}{1.822.081.028.595,18} \times 100\% \\ &= 99,67\% \end{aligned}$$

Rasio ekuitas dana terhadap total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio kewajiban terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri dalam membiayai pembangunan. Secara umum Rasio semakin kecil dibawah 100 % menunjukkan rasio yang sangat baik, artinya Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan sendiri dalam membiayai pembangunannya. Capaian 99,67% tahun 2009, menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang baik, artinya seluruh biaya pembangunan tidak tergantung pada pemerintah pusat atau pihak lain.

Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi} &= \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ \text{to Total Belanja th 2009} &= \frac{718.148.562.731,29}{802.095.631.362,29} \times 100\% \\ &= 89,53\% \end{aligned}$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 \text{to Total Belanja th 2009} &= \frac{82.279.630.710,00}{802.095.631.362,29} \times 100\% \\
 &= 10,26\%
 \end{aligned}$$

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah. Kota Bandar Lampung masih sebesar 10,26% tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sedikit digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur sehingga kurang membawa ke arah pembangunan yang lebih baik, atau Realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio PAD to} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\
 \text{Total Pendapatan th 2009} &= \frac{70.432.264.168,28}{793.492.316.672,28} \times 100\% \\
 &= 8,88\%
 \end{aligned}$$

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan asli daerah (PAD) dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian laba Usaha Daerah, dan Lain-lain PAD.

Rasio Kewajiban terhadap Pendapatan (*Debt Service Ratio*)

$$\begin{aligned}
 \text{DSR th 2009} &= \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok \& Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{522.020.976,29 + 70.643.380,09}{793.492.316.672,28} \times 100\% \\
 &= 0,07\%
 \end{aligned}$$

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan kewajiban. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga kewajiban akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan makin besar angka rasio maka makin jelek kondisi keuangan pemda atau makin berat beban APBD. Kota Bandar Lampung masih sebesar 0,07% tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kemampuan yang sangat tinggi memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR th 2009} &= \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\% \\
 &= \frac{711.677.100.552,28 - 492.027.570.476,20}{522.020.976,29 + 70.643.380,09 + 0} \times 100\% \\
 &= \frac{219.649.530.076,08}{592.664.356,38} \times 100\% \\
 &= 37.061,37\% \text{ atau } 371 \text{ kali}
 \end{aligned}$$

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman memiliki logika yang tidak berbeda dengan Debt Service Ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) pendapatan Daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman (pasal 12, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah).

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Dana Perimbangan} &= \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ \text{to Total Pendapatan th 2009} &= \frac{659.732.473.592,00}{\cancel{793.492.316.672,28}} \times 100\% \\ &= 83,14\% \end{aligned}$$

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam dana perimbangan antara lain: Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Kota Bandar Lampung dengan capaian sebesar 83,14% tahun 2009, menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

4.4 Penilaian Kinerja Keuangan

Analisis yang dilaksanakan dengan melakukan analisis data-data rasio keuangan untuk mengetahui apakah kinerja keuangannya dapat dikatakan baik, cukup, atau tidak baik. Masing-masing rasio diberi skor 2 untuk rasio baik, skor 1 untuk rasio tidak baik. Kriteria untuk pengujian rasio keuangan secara kualitatif adalah sebagai berikut:

Tabel Perincian Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Tahun 2009

No	Rasio	Rasio	Nilai	Baik	Tidak Baik	Nilai
A	Rasio Antar Pos Neraca					
1	Rasio Cair	447,53%	Baik ($\geq 100\%$)	Baik	-	2
2	Rasio Kewajiban To Total Aset	0,33%	Baik ($\leq 100\%$)	Baik	-	2
3	Rasio Ekuitas Dana To Total Aset	99,67%	Baik ($\leq 100\%$)	Baik	-	2
	Sub Total		6			6
B	Rasio Atar Pos Laporan Realisasi APBD					
1	Rasio Belanja Operasi To Total Belanja	89,53%	Baik ($\leq 50\%$)	-	Tidak Baik	1
2	Rasio Belanja Modal To Total Belanja	10,26%	Bail ($\geq 50\%$)	-	Tidak Baik	1
3	Rasio PAD To Total Pendapatan	8,88%	Bail ($\geq 50\%$)	-	Tidak Baik	1
4	DSR	0,07%	Baik ($\leq 0\%$)	Baik	-	2
5	DSCR	37.061,37% atau 371 kali	Baik (≤ 2.5 kali)	-	Baik	2
6	Rasio Dana Perimbangan To Total Pendapatan	83,14%	Baik ($\leq 50\%$)	-	Tidak Baik	1
	Sub Total		12			8
	TOTAL		18			14

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa kinerja keuangan Pemerintah Bandar Lampung pada tahun 2009 masih berada pada kategori CUKUP, dimana rasio antar pos neraca memperoleh nilai 6 dari nilai maksimum 6, sedangkan rasio antar pos laporan realisasi APBD memperoleh nilai 8 dari nilai maksimum 12. Untuk tahun 2010 dan seterusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, harus menurunkan Rasio Belanja Operasi To Total Belanja dari 89,53% menjadi dibawah 50%, menaikkan Rasio Belanja Modal To Total Belanja dari 10,26% menjadi diatas 50% , menaikkan Rasio PAD To Total Pendapatan dari 8,88% menjadi diatas 50% dan menurunkan Rasio Dana Perimbangan To Total Pendapatan dari 83,14% menjadi dibawah 50%, serta mempertahankan rasio keuangan yang sudah baik.

4.5 Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dengan Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas tercermin dari hasil audit oleh BPK, menurut sumber (www.BPKP.go.id) hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009 menyatakan pendapat “wajar dengan pengecualian”. Meskipun audit mengatakan sudah cukup, tetapi belumlah mencapai hasil yang maksimal, karena masih dalam wajar dengan pengecualian. Walaupun kinerja keuangannya mendapatkan kriteria CUKUP, tetapi kualitas laporan keuangannya belum maksimal. Sedangkan untuk mengukur suatu kinerja keuangan Pemerintah Daerah, haruslah Laporan Keuangannya dianggap berkualitas terlebih dahulu sehingga dapat lebih maksimal untuk menganalisis kinerja keuangannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bagian terdahulu, dapat diambil kesimpulan sbb:

1. Quik Ratio (rasio cair) pada tahun 2009 sebesar 447,53% menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik, artinya Pemerintah Kota Bandar Lampung per 31 Desember 2009 mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Kewajiban To Total Aset pada tahun 2009 sebesar 0,33 % menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik artinya Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam pembiayaan pembangunan seluruhnya ditanggung dengan kemampuan sendiri.
3. Rasio Ekuitas Dana To Total Aset pada tahun 2009 sebesar 99,67% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang baik, artinya seluruh biaya pembangunan tidak tergantung pada pemerintah pusat atau pihak lain.
4. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 89,53% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin atau tidak baik untuk perkembangan Kota Bandar Lampung masa yang akan datang.
5. Rasio Belanja Modal To Total Belanja Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 10,26%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sedikit digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur sehingga kurang membawa kearah pembangunan yang lebih baik, atau Realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin.
6. Rasio PAD To Total Pendapatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 8,88%, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan untuk pembangunan pada Kota Bandar Lampung sebagian besar masih tergantung kepada pemerintah pusat atau pihak lain.
7. Rasio Kewajiban Terhadap Pendapatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 0,07%, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kemampuan yang sangat tinggi memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
8. DSCR Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 37.061,37% atau 371 kali menunjukkan masih terbukanya peluang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.

9. Rasio dana perimbangan To Total Pendapatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 sebesar 83,14% menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bagian terdahulu, dapat dilakukan implikasi sbb:

1. Untuk tahun 2010 dan seterusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, harus menurunkan Rasio Belanja Operasi To Total Belanja dari 89,53% menjadi dibawah 50% Dengan melakukan efisiensi terhadap belanja operasional yang tidak memberikan nilai tambah.
2. Menaikkan Rasio Belanja Modal To Total Belanja dari 10,26% menjadi diatas 50% dengan menurunkan rasio belanja untuk operasi.
3. Menaikkan Rasio PAD To Total Pendapatan dari 8,88% menjadi diatas 50% dengan cara menggali potensi daerah dan meningkatkan pengawasan penerimaan PAD.
4. Menurunkan Rasio Dana Perimbangan To Total Pendapatan dari 83,14% menjadi dibawah 50%, dengan cara menaikkan PAD serta mempertahankan rasio keuangan yang sudah baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik : "Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3".
Jakarta : Salemba Empat

Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik : "Suatu Pengantar". **Jakarta: Erlangga**

M. Yusuf John dan Dwi Setiawan S. 2009. **Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia.** Jakarta: Gramedia

Permendagri: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

www.google.com, 17 Februari 2011 20.00 WIB

www.wikipedia.com 17 Februari 2011 20.00 WIB